

MERITOKRASI PERSPEKTIF AL-QUR'AN

Mu'ammarr Zayn Qadafy*

Abstract: *Meritocracy is considered as a balance political system between the two aristocracy and plutocracy. Dispute it's weaknesses, meritocracy can become solution for political chaos in our country. Al-Qur'an also talks about principles of meritocracy. This article is written to elaborate these principles through interpretation on al-Nūr, 24: 55; al-Isrā', 17: 84 and al-Tawbah, 9: 128. It is concluded that al-Qur'an agrees with the basic idea of meritocracy, it is to give an authority or to commend or to praise some one based on his or her achievements. Some of Qur'anic principles of meritocracy are: (1) capability, (2) morality, (3) professionalism, (4) careness and responsibility toward duties.*

Keywords: *Meritokrasi, al-Qur'an, Profesionalisme dan Etika Politik*

PENGANTAR: Problematika Meritokrasi Di Indonesia

Meritokrasi berasal dari kata “merit” yang berarti “kualitas bagus yang pantas untuk dihargai” (*a good quality which is deserve to be praised*).¹ Istilah meritokrasi dipakai pertama kali oleh Michael Young pada tahun 1958 dalam bukunya "*Rise of the Meritocracy*".² Dalam definisi praktisnya, sistem *merit* adalah proses promosi dan rekrutmen pejabat pemerintahan berdasarkan kemampuannya dalam melaksanakan tugas, bukan berdasarkan koneksi politis. Dengan kata lain, inti *merit system* adalah profesionalisme (baca: kinerja dan prestasi). Stephen J. McNamee mengidentifikasi empat syarat kunci dalam meritokrasi: bakat (*talent*), sikap yang benar (*right attitude*), kerja keras (*hard work*) dan moralitas tinggi (*high moral character*).³

Dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia yang menganut demokrasi, seharusnya meritokrasi bisa dipakai untuk memberangus Korupsi, Kolusi dan Nepotisme yang marak di birokrasi. Idealnya, karena demokrasi menghendaki kepemimpinan oleh banyak orang, proses perekrutannya tak bisa mengandalkan popularitas sebagaimana afiliasi beberapa artis tanah air ke beberapa partai politik. Tidak juga berdasarkan keturunan seperti aristokrasi atau pada kekayaan seperti plutokrasi; melainkan harus berpijak pada prestasi (*merit*).

Namun sayangnya, meritokrasi di era reformasi ini masih menjadi barang asing di negeri kita. Indikatornya: (1) Partai-partai yang terbentuk pasca reformasi kebanyakan masih berfungsi sebagai mesin politik tokoh tertentu saja. Meritokrasi

* Dosen STIT Islamiyyah Karya Pembangunan Paron Ngawi

¹ Jiwo Wungsu dan Hartanto Brotoharsojo, *Tingkatkan Kinerja Perusahaan Anda dengan Merit System* (Jakarta: Murai Kencana, 2003), 8.

² Michael Young, *Rise of The Meritocracy* (Bristol: Penguin Books, 1961), 79-82.

³ Stephen J. McNamee dan Robert K. Miller Jr., *The Meritocracy Myth* (Plymouth: Rowman and Littlefield Publisher, Inc; 2009), 25. Dalam definisi lain, meritokrasi sering dikaitkan dengan ide tentang kompetensi mumpuni (*skillful competence*). Lihat: Mika LaVaque-Manty, *The Playing Fields of Eton: Equality and Excellence in Modern Meritocracy* (Michigan: The University of Michigan Press, 2012), 100.

belum dipraktikkan sepenuhnya dalam sistem rekrutmen dan regenerasi, sampai penetapan calon kepala daerah, bahkan calon presiden; (2) Bagi PNS (Pegawai Negeri Sipil), perhitungan besaran gaji pokok sekarang ini mengacu pada masa kerja dan golongan.⁴ PNS dengan masa kerja dan golongan yang sama akan memiliki gaji pokok yang sama walaupun bobot pekerjaannya berbeda. Kondisi ini tidak mendorong PNS untuk lebih berprestasi sesuai dengan kompetensinya; (3) praktik nepotisme dalam -taraf tertentu- masih sering dijumpai. Pejabat birokrasi bisa menempati posisi strategis tertentu dalam institusi birokrasi bila ia adalah keluarga, teman dan pendukung saat kampanye. Penerimaan tenaga dosen dibanyak Perguruan Tinggi Negeri juga masih banyak yang berdasarkan status si pelamar, apakah dia alumni perguruan tinggi terkait atau tidak. Dengan kata lain, pencapaian kesuksesan karir didasarkan hanya pada relasi dan senioritas (baca: *link*). Tiga permasalahan ini ditambah munculnya wacana tentang dinasti politik yang terjadi di salah satu kabupaten baru-baru ini menjadi alasan pentingnya kajian tafsir tentang meritokrasi.

KAPABILITAS DAN MORALITAS (Tafsir QS. Al-Nūr, 24: 55)

Secara eksplisit, konsep meritokrasi berupa kapabilitas dan moralitas ditunjukkan dalam ayat berikut:

وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا
 اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَى لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ
 مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا وَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ
 فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ

Artinya: “Dan Allah telah berjanji kepada orang-orang yang beriman di antara kamu dan mengerjakan amal-amal yang saleh bahwa Dia sungguh-sungguh akan menjadikan mereka berkuasa dimuka bumi, sebagaimana Dia telah menjadikan orang-orang sebelum mereka berkuasa, dan sungguh Dia akan meneguhkan bagi mereka agama yang telah diridhainya untuk mereka, dan Dia benar-benar akan menukar (keadaan) mereka, sesudah mereka dalam ketakutan menjadi aman sentausa. mereka tetap menyembahku-Ku dengan tiada mempersekutukan sesuatu apapun dengan aku. dan Barangsiapa yang (tetap) kafir sesudah (janji) itu, Maka mereka Itulah orang-orang yang fasik.”

Diamanatkannya *khilāfah* pada seseorang, menurut ayat ini, adalah jika seseorang tersebut telah membuat dua pencapaian penting: iman (berujung pada moralitas) dan amal *ṣālih* (kemampuan melaksanakan pekerjaan yang baik dan

⁴ Dalam birokrasi, ada istilah DP3 (Daftar Penilaian Prestasi Pekerjaan). Di sana terdapat *item* kesetiaan yang berarti kenaikan pangkat setiap beberapa tahun. Adapun pegawai dengan jabatan pada masa transisi eselon, bisa naik pangkat setiap tahunnya. Memang terdapat keringanan bagi pejabat yang memiliki ijazah tertentu untuk loncat ke pangkat yang lebih tinggi dari seharusnya, namun sebagaimana menjadi rahasia umum, mendapatkan ijazah bukanlah hal sulit dan terkadang tidak ada kaitannya dengan aktifitas akademik pejabat tersebut. lihat: Azhari, *Mereformasi Birokrasi Publik Indonesia* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011), 201-210.

bermanfaat). Tidak tanggung-tanggung, *reward* yang akan dianugerahkan kepadanya adalah: (1) hak atas *khilāfah* di muka bumi, (2) agama yang teguh dan (3) jaminan diri dari perasaan takut.

Definisi *īmān* dalam ayat ini tidak merujuk kepada definisi sempit (baca: percaya), melainkan mengandung pengertian iman yang lebih kompleks. Yaitu iman yang terimplementasikan ke dalam moral luhur. Ini dapat ditemukan dengan melihat *munāsabah* antara ayat ini dengan kumpulan ayat sebelumnya. Pada QS. Al-Nūr, 24: 47-50, Allah menerangkan ciri-ciri orang yang tidak beriman sebagai pembelot dari taat kepada Allah dan rasul-Nya (QS. Al-Nūr, 24: 47-48) dan hanya mengakui kepentingan pribadi (QS. Al-Nūr, 24: 49) sebab keragu-raguan dalam hati mereka (QS. Al-Nūr, 24: 50). Sebagai *counter-behaviour* dari sifat-sifat “tidak iman” di atas, al-Qur’an lantas menyebutkan ciri orang beriman sebagai orang yang memiliki ketaatan utuh dalam mengikuti aturan Allah dan rasulNya (QS. Al-Nūr, 24: 51-53). Tentu saja, taat kepada Allah tidak dimaksudkan lain kecuali ketaatan dalam segala hal baik terhadap aturan Allah tentang hubungan manusia denganNya maupun antar manusia.

Banyak versi mengenai *sabāb al-nuzūl* ayat tersebut. Mālik menyebutkan, turunnya ayat ini terkait dengan kekhawatiran para sahabat Nabi akan kekuatan serta keberanian kaum Quraish. Abū al-‘Āliyah memberi versi yang lebih spesifik. Sepuluh tahun setelah kenabian, umat Islam diperintahkan untuk hijrah ke Madinah. Namun, ketakutan mereka meninggalkan tanah kelahirannya menuju Madinah, tidak lebih kecil dari ketakutan mereka atas perlakuan buruk yang mereka alami di Makkah. Mereka berkata: “kapan akan datang hari ketika kita merasa aman dan tidak perlu membawa senjata?”. Nabi menjawab: “(Di Madinah) kalian akan mengalami kemudahan, sampai-sampai seseorang di antara kamu bisa duduk dengan tenang tanpa beban”. Setelah nabi menyampaikan visinya tersebut, turunlah QS. Al-Nūr, 24: 55.⁵

Konteks historis ini memberikan penekanan makna “pengorbanan” dalam mencapai integritas. Demi menjalankan perintah Allah untuk hijrah, umat Islam rela memulai kehidupan duniawi mereka dari awal, membangun peradaban baru serta meninggalkan keluarga dan harta benda di negeri asal⁶. Jika dikaitkan dengan masa sekarang, seharusnya pejabat negara yang berhak atas kenaikan gaji dan pangkat adalah yang sudah mengorbankan minimal waktu dan tenaganya dengan sungguh-sungguh untuk memenuhi tugas dan kewajibannya.

Di tempat lain, al-Qur’an menjadikan moral dan kapabilitas sebagai acuan dalam mempekerjakan seseorang sebagaimana dalam percakapan antara putri pemuka Madyan dengan Musa AS dalam QS. Al-Qaṣaṣ, 28: 26, sebagaimana berikut:

قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَا أَبَتِ اسْتَأْجِرْهُ إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ
الْأَمِينُ

⁵ Al-Qurṭubī, *al-Jāmi' li Ahkām al-Qur'ān* (Riyadh: Dar Alam al-Kutub, 2003), Vol. 12, 297.

⁶ Badri Yatim, *Sejarah Peradaban Islam* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1998), 18-25. Bandingkan dengan: Maman A. Malik Sya'roni, “Peletakan Dasar-dasar Peradaban Islam di Masa Rasulullah”, dalam Siti Maryam (ed.), *Sejarah Peradaban Islam Dari Masa Klasik hingga Modern* (Yogyakarta: LESFI, 2006), 27-29.

Artinya: “Salah seorang dari kedua wanita itu berkata: "Ya bapakku ambillah ia sebagai orang yang bekerja (pada kita), karena Sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) ialah orang yang kuat lagi dapat dipercaya".

Dalam rangkaian cerita mulai ayat ke-23 sampai 29, putri tersebut meminta kepada ayahnya agar Musa dipekerjakan sebagai penggembala binatang ternak karena Musa telah membantunya mengambil air (QS. Al-Qaṣaṣ, 28: 24), dan menurutnya, Musa memiliki dua kelebihan: kemampuan (*quwwah*) dan amanah (*amānah*),⁷ yang pertama melambangkan kesempurnaan dalam bekerja dan yang kedua melambangkan moralitas luhur sehingga dapat dipercaya. Inti yang sama juga terdapat dalam QS. Yūsuf, 12: 54, QS. Al-Takwīr, 81: 19-21 dan QS. Al-Baqarah, 2: 247.

Pada QS. Yūsuf, 12: 54, setelah dilakukan *interview* oleh Fir'aun kepada Yūsuf, ia lantas diangkat sebagai bendahara negara karena terlihat ia adalah seseorang yang *amīn*. Sedang pada QS. Al-Takwīr, 81: 19-21, Jibril disifati oleh Allah sebagai malaikat yang mumpuni (*dzū quwwah*) dan *amīn*, sehingga ia pantas menjadi utusan yang menyampaikan al-Qur'an kepada Muhammad SAW.

Seharusnya prinsip kapabilitas ini dijadikan tolak ukur dalam pengangkatan pejabat. Menteri olah raga harusnya juga faham tentang seluk beluk permasalahan olah raga dan mampu mencari solusi disetiap permasalahannya. Menteri perekonomian sebaiknya juga seorang ekonom yang memiliki integritas yang diakui. Pemilihan pejabat berdasarkan agama, suku dan ras atau bahkan afiliasi partai dan kepentingan-kepentingan praktis para elit politik harus sebisa mungkin dihindari.⁸ Dalam penerimaan kader partai politikpun juga demikian. QS. Al-Baqarah, 2: 247 jelas-jelas menyalahkan praktik rekrutmen kader partai yang hanya berdasarkan donasinya untuk operasional partai, karena yang terpenting adalah بسطة في العلم و الجسم bukan سعة من المال.

PROFESIONALISME (*RIGHT ATTITUDE*) (TAFSIR AL-ISRĀ', 17 :84)

قُلْ كُلٌّ يَعْمَلُ عَلَىٰ شَاكِلَتِهِ فَرَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَنْ هُوَ أَهْدَىٰ سَبِيلًا

Artinya: “Katakanlah: "Tiap-tiap orang berbuat menurut keadaannya[867] masing-masing". Maka Tuhanmu lebih mengetahui siapa yang lebih benar jalannya”.

Ayat ini lebih terasa nuansa ancamannya dibanding sebagai sekedar perintah saja. Nuansa ini terlihat dari berita al-Qur'an tentang dua sifat manusia

⁷ al-Khāzin menambahkan sebuah cerita *Isrā'iliyyat* dalam tafsirnya. Ketika pemuka Madyan tersebut menanyai putrinya tentang yang dimaksudnya dengan “kekuatan” dan “amanah”, putrinya berkata: “orang ini (Musa) mampu mengangkat sebuah batu besar dari tepi sumur, padahal sepuluh orang bersama-samapun belum tentu mampu mengangkatnya. Dan ketika perjalanan ke rumah, ia menyuruhku berjalan di belakangnya agar angin tidak menerjangku”. Abū al-Ḥasan al-Khāzin, *Lubāb al-Ta'wīl fī Ma'āni al-Tanzīl* (Beirūt: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1995), Vol. 5, 101. Bandingkan dengan: Ibn Taymiyyah, *al-Siyāsah al-Shar'iyyah fī Iṣlāḥ al-Ra'ī wa al-Ra'iyyah* (Beirūt: Dār 'Ālam al-Fawā'id, tt), 17.

⁸ Umar juga pernah berpesan pada anaknya:

Ibid., 8 من ولي من أمر المسلمين شيئا فولي رجلا لمودة أو قرابة بينهما, فقد خان الله و رسوله و المسلمين.

lemah pada QS. Al-Isrā', 17 : 83: lupa diri ketika mendapatkan nikmat dan putus asa ketika ditimpa kesusahan. Sebagai pamungkas, ayat ke-84 ini mengancam jika tetap demikian sifat manusia lemah tadi, maka ia akan mendapatkan balasan yang setimpal dengan sifatnya tersebut. Nada ungkapan dan struktur bahasa yang sama (*li al-tahdīd*) juga digunakan al-Qur'an dalam QS. Hūd, 11: 121-122.

"Dan Katakanlah kepada orang-orang yang tidak beriman: "Berbuatlah menurut kemampuanmu; Sesungguhnya Kami-pun berbuat (pula). Dan tunggulah (akibat perbuatanmu); Sesungguhnya Kami-pun menunggu (pula)."

Kata *shākilah* berasal dari *shaklun* yang berarti "yang serupa" (*al-shibh*) atau "yang sepadan" (*al-mithl*). Sedang *shākilah* dapat berarti arah (*naḥiyah/wijhah*), jalan (*ṭarīqah*),⁹ atau kodrat/nature (*sajjiyyah*).¹⁰ Ada juga yang menafsirkan tabiat (*tabī'ah*), niat (*niyah*) dan agama (*dīn*).¹¹ Kajian kebahasaan ini menunjukkan seakan-akan makna dari *shākilah* adalah potensi diri. Namun melihat *munāsabah* di atas, penulis lebih cenderung kepada makna *shākilah* sebagai "kemampuan mengambil sikap". Di antara yang berpendapat demikian adalah al-Baghawī yang memaknai *shākilah* sebagai السبيل الذي اختاره لنفسه,¹² juga al-Rāzī. Menurutnya, *Shākilah* adalah *al-ṭarīqah/ al-madhhab*. Ia berdasar pada sebuah ungkapan Arab: يتشعب منه طرق كثيرة, yang berarti هذا طريق ذو شواكل.¹³ Artinya, dalam menentukan *shākilah*, ada proses berpikir, memilih dan menentukan.

Secara implisit, QS. Al-Isrā', 17: 83 menunjukkan bahwa sebenarnya ada potensi pada setiap manusia untuk menjadi baik dalam keadaan senang maupun susah. Namun beberapa (atau malah kebanyakan) orang memilih untuk bersikap sebaliknya. Mereka lebih menuruti keadaan dari pada membuat sikap positif menyikapi keadaan tersebut. Memang al-Qur'an sendiri mengakui bahwa manusia itu pada dasarnya diciptakan sebagai makhluk yang suka berkeluh kesah (هلوع). Jika ditimpa kesusahan ia berkeluh kesah (إذا مسه الشر جزوعا) dan jika mendapat kebaikan ia kikir (وإذا مسه الخير منوعا) (QS. Al-Ma'ārij, 70: 19-21).¹⁴ Namun manusia juga memiliki pilihan untuk tidak menjadi seperti itu jika mereka mau menjaga sholat, mengeluarkan zakat, bertaqwa dan memelihara dirinya (QS. Al-Ma'ārij, 70: 22-35).

Sebenarnya, sifat cinta diri sendiri (egoisme) adalah naluri manusia yang tidak buruk. Namun, sangat mungkin menjadi buruk jika manusia keliru menggunakannya.¹⁵ Karenanya, untuk menjaga naluri manusia agar tetap di

⁹ Muḥammad Ibn Mukrim Ibn Mandūr, *Lisān al-'Arab* (Beirut: Dār Ṣādir, tt), Vol. 11, 356.

¹⁰ al-Rāghib al-Aṣfahānī, *al-Mufradāt fī Gharīb al-Qur'ān*, DVD RoM al-Maktabah al-Shāmilah (Solo: Ridwana Press, 2007), vol. 1, hal. 266.

¹¹ Ibn Kathīr, *Tafsīr al-Qur'ān al-'Aḍīm* (Beirut: Dār Ṭayyibah, 1999), Vol. 5, 115.

¹² Abū Muḥammad al-Baghawī, *Ma'alim al-Tanzīl* (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2004), Vol. 5, 124.

¹³ Muḥammad Ibn 'Umar al-Rāzī, *Mafātiḥ al-Ghayb* (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2009), Vol. 10, 114.

¹⁴ Bandingkan juga dengan QS. Al-Fajr, 89: 15-16.

¹⁵ Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah* (Jakarta: Lentera Hati, 2003), Vol. 14, 441-442.

jalannya (*on the right track*), orientasi manusia dalam menjalani kehidupan seharusnya terfokus pada pencapaian kualitas kemanusiaan (*being oriented*), bukan sekedar terobsesi ingin meraih atribut kehidupan, seperti jabatan, kekayaan, kedudukan dan strata sosial (*having oriented*).¹⁶

Dalam konteks Indonesia, maraknya kasus korupsi yang melibatkan banyak elit politik menunjukkan kepada kita bagaimana para pemimpin Indonesia belum mampu bersikap tegas terhadap kesenangan-kesenangan duniawi. Iming-iming uang dengan jalan pintas masih menjadi *shākilah* yang enak untuk ditempuh dan sulit dihindari. Semboyan “*say no to korupsi*” seakan menjadi ucapan kosong saja. Pejabat seperti inilah yang integritasnya tidak lagi bisa dipercaya. Indonesia membutuhkan pejabat “bersih” yang memiliki sikap, tidak *minggrang-minggring*, terutama jika itu menyangkut amanah yang diembannya.

Frasa penutup ayat ini (فَرِيكُمْ أَعْلَمُ بِمَنْ هُوَ أَهْدَى سَبِيلًا) juga bisa dikontekstualisasikan dengan keadaan masyarakat Indonesia dewasa ini. Rakyat memiliki sistem *merit*-nya sendiri. Jika ada pejabat publik baik yang kebijakan-kebijakannya berorientasi pada kepentingan rakyat, elektabilitasnya pribadi serta partai politik yang menaunginya ikut naik. Begitu pula sebaliknya. Ini karena diam-diam, masyarakat memiliki memori kolektif tentang kinerja para pejabat tersebut.¹⁷

KEPEDULIAN DAN TANGGUNG JAWAB (Tafsir al-Tawbah, 9: 128)

لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِنْ أَنْفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ
بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ

Artinya: “Sungguh telah datang kepadamu seorang Rasul dari kaummu sendiri, berat terasa olehnya penderitaanmu, sangat menginginkan (keimanan dan keselamatan) bagimu, Amat belas kasihan lagi Penyayang terhadap orang-orang mukmin”.

Jika dilihat, susunan ayat dalam akhir surat *al-tawbah*, ada kesan bahwa ayat ini adalah penegasan tentang ke-luar biasa-an sosok Muhammad SAW sebagai seseorang yang patut diikuti dan ditaati tanpa keragu-raguan. Penegasan ini ditujukan pada dua golongan: (1) penduduk Madinah, kaum muslimin yang belum mengikuti Rasul sepenuhnya (QS. Al-tawbah, 9 : 119-123) dan (2) orang-orang munafik yang terus menerus menghina Muhammad dan meragukan kenabiannya (QS. Al-tawbah, 9 : 124-127).

Bagaimanapun juga, tidak ada yang bisa membantah bahwa popularitas Muhammad tidak muncul secara tiba-tiba. Sejak masih kanak-kanak dampai dewasa dan kemudian diangkat menjadi Rasul, beliau dikenal berbudi luhur dan kepribadian mulia; tak ada perbuatan tercela yang dapat dituduhkan padanya. Tidak pernah menyembah berhala, memakan daging yang disembelih untuk berhala, minum *khamr*, dan mendatangi tempat perjudian. Ia dikenal sebagai

¹⁶ Ris'an Rusli, “Penyelenggaraan Negara: antara Amanah dan Korupsi”, dalam Suyitno (ed.), *Korupsi, Hukum dan Moralitas Agama: Mewacanakan Fikih Anti-Korupsi* (Yogyakarta: Gama Media, 2006), 160.

¹⁷ Ibid, 162.

orang pemalu namun murah hati, mudah bergaul dan bijaksana. Lisannya fasih, bicaranya sedikit dan banyak mendengarkan.¹⁸ Nabi sendiri juga pernah mendeklarasikan bahwa dirinyalah sebaik-baiknya ciptaan Tuhan (*khayr kholq Allāh*) dan dari keturunan (*nasab*) terjaga.¹⁹

Seharusnya, dengan keutamaan-keutamaan yang jelas ini, tidak ada lagi ada keraguan terhadap *risālah*-nya. Namun, tetap saja keraguan itu muncul. Maka pada ayat di atas, alasan-alasan yang disampaikan al-Qur'an mengenai alasan hak kepemimpinan pada diri Rasulullah ada tiga hal: (1) kepedulian (baca: ikut merasakan) dengan penderitaan orang-orang muslim (*'izzah mā 'anittum 'alayh*), (2) menginginkan keselamatan dan kebaikan umat Islam (*hirs 'alaykum*),²⁰ (3) mengasihi dan menyayangi umat Islam (*ra'fah wa rahmah bi al-mu'minīn*). Tiga hal ini mengisyaratkan bahwa yang berhak diikuti adalah pemimpin yang memiliki kepedulian dan tanggung jawab terhadap yang dipimpinnya.

Kepedulian Muhammad dengan penderitaan umat Islam tidak hanya diucapkan lewat kata-kata saja, tetapi ia sendiri turut merasakan penyiksaan, pengasingan dan pelecehan dari orang Quraish di Makkah,²¹ bergotong-royong mengikuti proses pembangunan masjid di Madinah dan benteng parit pada perang *Khandaq*²² bahkan hidup sederhana sebagaimana rakyat biasa yang berjalan-jalan dan belanja di pasar (QS. Al-Furqān, 25: 7).²³ Perangai Rasulullah sebagai pemimpin bersahaja ini yang seharusnya dijadikan salah satu tolak ukur memilih pemimpin. Yang masih jadi persoalan di Indonesia adalah *blusukan* para calon wakil rakyat ke kampung-kampung hanya menjelang masa pemilihan saja. Ironis, karena kepedulian yang ditunjukkan tak lebih dari sekedar usaha menarik simpati dan mendulang suara.

Sebagai akhir dari tulisan ini, perlu diketengahkan pendapat al-Māwardī mengenai alasan-alasan diperbolehkannya penurunan dari kekuasaan (*'azl*). Ini penting, karena sistem *'azl* berjalan searah dengan system *merit*. *'Azl* diperbolehkan jika dalam diri pemerintah/ pejabat terdapat salah satu dari: (1) khianat, (2) lemah dan inkapabilitas, (3) tirani, (4) lembek dan tidak progresif, (5) memiliki kemampuan lebih dari tugasnya (di sini, penurunan berarti mutasi), (6) ada yang lebih kompeten, (7) kritik yang terbukti benar dari orang lain atas kinerjanya yang buruk dan (8) sering melimpahkan tugas kepada orang lain.²⁴

¹⁸ Ḥusayn Haykal, *Ḥayāh Muḥammad* (Kairo: Maktabah al-Naḥḍiyyah al-Miṣriyyah, 1968), 108-109.

¹⁹ Shihāb al-Dīn al-Alūsī, *Ruḥ al-Ma'ānī fī Tafsīr al-Qur'ān al-'Aḍīm wa al-Sab' al-Mathānī*, DVD RoM al-Maktabah al-Shāmilah, Vol. 7, 410.

²⁰ al-Rāzī memaknai *hārīṣun 'alaykum* dengan *hārīṣun 'alā ṭṣāl al-khayrāt ilaykum fī al-dunyā wa al-akhīrah*. Lihat, Muḥammad Ibn 'Umar al-Rāzī, *Mafātiḥ al-Ghayb*, Vol. 8, 192.

²¹ Ṣafīyy al-Raḥmān al-Mubārakfūrī, *al-Raḥīq al-Makhtūm, Baḥṡ fī al-Sīrah al-Nabawīyyah* (Beirūt: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2007), 66-67.

²² Sahl Ibn Sa'īd meriwayatkan, sebagaimana dikutip oleh al-Bukhārī: "*Kunnā ma'a rasūlillāh fī al-khandaq, wa hum yaḥfirūna wa naḥnu nunqilu al-turāb 'alā aktādīna*". Ibid, 207.

²³ "وقالوا مال هذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق"

²⁴ Abū al-Ḥasan al-Māwardī, *Qawānīn al-Wizārah wa Siyāsah al-Mulk* (Beirut: Dār al-Ṭal'īyyah, 1979), 196-198.

KESIMPULAN

Sistem *merit*, jika sungguh-sungguh diterapkan, memberikan harapan akan terciptanya pemerintahan yang bersih dan bermatahat, sekaligus akan menyehatkan persaingan politik di birokrasi. Al-Qur'an pada dasarnya mengatur beberapa *point* penting tentang mekanisme *sistem* merit. Beberapa unsur penting dalam al-Qur'an adalah: (1) kapabilitas dan moralitas sebagaimana dalam QS. Al-Nūr, 24: 55; QS. Al-Qaṣaṣ, 28: 26; QS. Yūsuf, 12: 54; QS. Al-Takwīr: 19-21 dan QS. Al-Baqarah, 2: 247, (2) profesioanalisme seperti dalam QS. Al-Isrā', 17: 84 dan (3) kepedulian serta tanggung jawab seperti dalam QS. Al-tawbah, 9: 128.

Al-Qur'an memberi aturan umum bagi kita dalam memilih wakil rakyat, memperkejakan orang ataupun memberikan kepercayaan *imāmah* kepada seseorang, yaitu penegasian terhadap tendensi agama, suku dan ras atau bahkan afiliasi partai dan kepentingan-kepentingan praktis para elit politik. Orang pilihan ini juga harus memiliki sikap tegas, terutama dalam menghadapi praktik KKN yang telah membudaya, tidak munafik serta benar-benar mengemban amanahnya dengan kepedulian tulus dan penuh tanggung jawab.

DAFTAR PUSTAKA

- Alūsī (al), Shihāb al-Dīn. *Ruḥ al-Ma'ānī fī Tafsīr al-Qur'ān al-'Adīm wa al-Sab' al-Mathānī*, DVD RoM al-Maktabah al-Shāmilah. Solo: Ridwana Press, 2007.
- Aṣḥānī (al), al-Rāghib. *al-Mufradāt fī Ghariḥ al-Qur'ān*, DVD RoM al-Maktabah al-Shāmilah. Solo: Ridwana Press, 2007.
- Azhari. *Mereformasi Birokrasi Publik Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011.
- Baghawi (al), Abū Muḥammad. *Ma'ālim al-Tanzīl*. Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2004.
- Haykal, Ḥusayn. *Ḥayāh Muḥammad*. Kairo: Maktabah al-Naḥḍiyyah al-Miṣriyyah, 1968.
- Kathīr, Ibn. *Tafsīr al-Qur'ān al-'Adīm*. Beirut: Dār Ṭayyibah, 1999.
- Khāzin (al), Abū al-Ḥasan. *Lubāb al-Ta'wīl fī Ma'ānī al-Tanzīl*. Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1995.
- LaVaque-Manty, Mika. *The Playing Fields of Eton: Equality and Excellence in Modern Meritocracy*. Michigan: The University of Michigan Press, 2012.
- Mandūr, Muḥammad Ibn Mukrim Ibn. *Lisān al-'Arab*. Beirut: Dār Ṣādir, tt.
- Maryam, Siti (ed.). *Sejarah Peradaban Islam Dari Masa Klasik hingga Modern*. Yogyakarta: LESFI, 2006.
- Māwardī (al), Abū al-Ḥasan. *Qawānīn al-Wizārah wa Siyāsah al-Mulk*. Beirut: Dār al-Ṭal'iyyah, 1979.
- McNamee, Stephen J. dan Robert K. Miller Jr.. *The Meritocracy Myth*. Plymouth: Rowman and Littlefield Publisher, Inc; 2009.
- Mubārakfūri (al), Ṣafiyy al-Raḥmān. *al-Raḥīq al-Makhtūm, Baḥth fī al-Sīrah al-Nabawiyyah*. Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2007.

- Qurtūbī (al), *al-Jāmi' li Ahkām al-Qur'ān*. Riyadh: Dar Alam al-Kutub, 2003.
- Rāzi (al), Muḥammad Ibn 'Umar. *Mafātiḥ al-Ghayb*. Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2009.
- Shihab, Quraish. *Tafsir al-Misbah*. Jakarta: Lentera Hati, 2003.
- Suyitno (ed.), *Korupsi, Hukum dan Moralitas Agama: Mewacanakan Fikih Anti-Korupsi*. Yogyakarta: Gama Media, 2006.
- Taymiyyah, Ibn. *al-Siyāsah al-Shar'iyah fī Iṣlāḥ al-Rā'ī wa al-Ra'iyyah*. Beirut: Dār 'Ālam al-Fawā'id, tt.
- Wungsu, Jiwo dan Hartanto Brotoharsojo. *Tingkatkan Kinerja Perusahaan Anda dengan Merit System*. Jakarta: Murai Kencana, 2003.
- Yatim, Badri. *Sejarah Peradaban Islam*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1998.
- Young, Michael. *Rise of The Meritocracy*. Bristol: Penguin Books, 1961.